

14.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA NEGERI 1 GEDANGAN SIDOARJO

by Ertien Rining Nawangsari

Submission date: 07-Feb-2020 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1252910211

File name: 44-122-1-PB.pdf (167.36K)

Word count: 3489

Character count: 23022

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA NEGERI 1 GEDANGAN SIDOARJO

Oleh

Ertica Rining Nawangsari,

Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP-UPN Veteran Jawa Timur

ABSTRAK

Pendidikan Inklusif adalah salah satu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. SMA Negeri 1 Gedangan adalah salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif. Pendidikan Inklusif di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di SMA Negeri 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian yaitu: Komunikasi antar Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan, Sumber Daya yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan yang meliputi staff, fasilitas, dan keuangan, Disposisi atau watak SMA Negeri 1 Gedangan dalam menerima siswa Inklusif, Struktur Birokrasi.

Hasil penelitian adalah SMA Negeri 1 Gedangan sudah mengimplementasikan dengan cukup baik dan berjalan dengan cukup baik. Karena masih terdapat kendala seperti : komunikasi yang kurang jelas antara pembuatan kebijakan dengan pelaksana kebijakan, kurangnya sumberdaya yang dimiliki mulai dari staff, Fasilitas dan keuangan, kurangnya dukungan dari pemerintah. Meskipun dengan adanya kendala – kendala tersebut kebijakan Program Pendidikan Inklusif tersebut dapat dijalankan dengan cukup baik dan semestinya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat menjamin terbukanya jalan bagi setiap individu manusia untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dalam kehidupan berbangsa, pendidikan memiliki sebuah peran penting, yaitu sebagai salah satu sarana pencapaian tujuan negara. Pendidikan merupakan pondasi bagi terbentuknya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan berdampak positif bagi berlangsungnya pembangunan yang merupakan langkah penting tercapainya tujuan negara.

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

meningkatkan kehidupan bangsa. Selain itu, Pendidikan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mencetakkan suatu bangsa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas dan mandiri. Pemerintah Indonesia sendiri menaruh perhatian yang sangat besar kepada sektor pendidikan. Dengan adanya UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diharapkan masyarakat dapat menerima pendidikan secara adil dan merata tanpa harus membedakan – bedakan antara anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Agar suatu perbedaan tersebut tidak terjadi dikalangan masyarakat dan untuk membantu mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus agar mampu beradaptasi, bergaul, dan beraktivitas sesuai dengan anak yang semestinya (Normal). Maka dari itu pemerintah melalui Menteri Pendidikan membuat suatu Program Sekolah Inklusif yang yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewah. Kemudian dari Permendikbud Nomer 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang dituangkan kedalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang menaruh perhatian besar terhadap layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, terutama pendidikan inklusif. Dibuktikan dengan dielklarasikannya Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten pro-inklusif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga sempat menerima beberapa penghargaan atas komitmen dan pencapaiannya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, salah satunya yaitu Inclusive Award adalah suatu penghargaan bagi pelopor pembudayaan pendidikan Inklusif di Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada awal tahun 2013. Pendidikan Inklusif tersebut di atur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 tahun 2011 yang mengatur tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Peserta didik dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah semua anak-peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki karakteristik, perkembangan, dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik pada umumnya. Peserta didik berkebutuhan Khusus dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif memiliki beberapa ketunaan yang bermacam – macam seperti :

1. Tunanetra, adalah peserta didik yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 atau tidak memiliki penglihatan (tunanetra total).
2. Tunarungtu, adalah peserta didik yang memiliki gangguan pendengaran baik yang permanen maupun tidak permanen.
3. Tunawicara, adalah peserta didik yang memiliki gangguan dalam berbicara.
4. Tunagrahita, adalah peserta didik yang memiliki kemampuan intelegensi yang signifikan berada di bawah rata - rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.
5. Tunadaksa, adalah peserta didik yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro - muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan.
6. Tunalaras, adalah peserta didik yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma - norma.
7. Berkesulitan belajar, adalah peserta didik yang memiliki gangguan pada satu atau lebih proses psikologi dasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan Bahasa, wicara maupun tertulis, ketidak sempurnaan untuk mendengar, berpikir, bicara, membaca, mengeja, dan melakukan perhitungan matematika.
8. Lamban belajar, adalah peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan dibatas umbang yakni tingkat IQ 71-89.
9. Artis, adalah peserta didik yang mengalami gangguan perkembangan secara signifikan mempengaruhi kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosialnya.
10. Memiliki gangguan motorik, adalah peserta didik yang mengalami gangguan dalam aktivitas motoriknya.
11. Menjadi korban penyalagunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.
12. Tunaganda, adalah peserta didik yang mengalami dua atau lebih kelainan dalam segi jasmani, keindrian, mental, sosial dan emosi, sehingga untuk mencapai perkembangan kemampuan yang optimal diperlukan pelayanan khusus dalam Pendidikan, medis, dan sebagainya.
13. Cerdas dan/atau berbakat istimewa, adalah peserta didik yang memiliki kelebihan dan keistimewaan dalam hal kecerdasan, kreativitas, kemampuan berfikir secara kritis dan memiliki kemampuan dalam mengekspresikan diri dalam beberapa Bahasa, namun mereka cenderung mengalami kesulitan dalam belajar dan kesulitan dalam berperilaku yang berdampak pada tampilan akademis, konsep diri, dan cara bersosialisasi, peserta didik cerdas istimewa memiliki karakteristik IQ diatas 130.
14. Memiliki kelemahan lainnya.

Tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas - luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan, serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan

yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dilakukan mulai dari tingkat pendidikan TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK.

Dalam pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif ini, ada 2 cara penyelenggaraan, yaitu dengan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan melalui para pengajuat. Sekolah yang akan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai sekolah untuk menyelenggarakan program Pendidikan Inklusif (Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Peserta Didik, dan Orang Tua).
2. Komitmen sekolah terhadap pengembangan sekolah ramah peserta didik dan kesetaraan pelayanan Pendidikan dengan Pendidikan yang fleksibel dan akomodatif terhadap kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus.
3. Terdapat peserta didik berkebutuhan khusus dilingkungan sekolah
4. Memiliki jaringan kerjasama dengan Lembaga lain yang relevan (misalnya Pusat Sumber, LPTK terkait).
5. Tersedia sarana penunjang yang memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus mengakses fasilitas pembelajaran.
6. Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang Pendidikan Inklusif dan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
7. Memenuhi prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Tersedia guru pembimbing khusus (GPK).
9. Memiliki program pendukung penyelenggara Pendidikan Inklusif (pelatihan guru, program identifikasi dan asesmen dsb).

SMA Negeri 1 Gedangan merupakan SMA yang pertama kali diunjuk sebagai pelaksana pendidikan inklusif dan menjadi sekolah percontohan di Kabupaten Sidoarjo. SMA Gedangan juga merupakan sekolah yang memiliki paling banyak siswa Inklusif dari SMA – SMA di Kabupaten Sidoarjo, dengan jumlah 14 siswa Inklusif yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan. SMA ini merupakan SMA yang berhasil bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membantu siswa inklusif yang berminat untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan.

Meskipun Kabupaten Sidoarjo sudah mendapatkan penghargaan, tetapi dalam pengimplementasiannya masih terdapat banyak kendala – kendala yang dihadapinya, seperti kurangnya sosialisasi ke masyarakat, hal tersebut didapatkan dari laporan masyarakat yang memuat “setahu saya, kabupaten sidoarjo sudah menunjuk sekolah SMA 1 tamm sebagai sekolah inklusif, tetapi saya belum mendapatkan info itu sendiri dari sekolahnya atau tidak tau sama sekali bahwa sekolah sudah menerapkan sekolah inklusif” (Sumber : Jawa Pos). Kemudian kurangnya sumber daya manusia dalam mengoptimalkan program sekolah inklusif. Hal tersebut dapat dilurus di Jawa Pos 27 oktober 2015 yang memuat “Sidoarjo- meski sidoarjo telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Pendidikan Inklusi 2 tahun lalu, pelaksanaan di lapangan belum optimal. Penyebabnya adalah kurangnya jumlah tenaga pendamping khusus”.

Sehingga berdasarkan permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melibat Implementasi Program Pendidikan Inklusif Di SMA Negeri 1 Gedangan.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan.

Menurut George Edward III, suatu keberhasilan atau kegagalan Implementasi dapat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu :

1. Komunikasi
2. sumber daya
3. disposisi
4. Struktur Organisasi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian dekriftif kualitatif. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang Impelmentasi Kebijakan Program Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan. Dengan menggunakan fokus teori George C. Edward III. Lokus penelitian di SMA Negeri 1 Gedangan.

Fokus penelitian yaitu: Komunikasi antar Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan, Sumber Daya yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan yang meliputi staff, fasilitas, dan keuangan, Disposisi atau watak SMA Negeri 1 Gedangan dalam menerima siswa Inklusif, Struktur Birokarsi

HASIL PENELITIAN

Fokus utama dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III. Menurut Edward, terdapat empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor – faktor atau variable tersebut adalah :

1. Komunikasi : Komunikasi terdapat 3 variabel yaitu :

a. Transmisi :

Penyampaian informasi atau transmisi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada SMA Negeri 1 Gedangan adalah melalui penunjukan Surat Keputusan (SK) dan kemudian yang dilanjutkan dengan workshop. Untuk menyampaikan informasi tentang Program Pendidikan Inklusif kepada sarana program tersebut, SMA Negeri 1 Gedangan melakukan sosialisasi kepada wali murid siswa ataupun masyarakat pada saat pengumpulan wali murid tahun pelajaran baru, dan juga sudah tercantang juga pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

b. Kejelasan

Kejelasan tentang penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada SMA Negeri 1 Gedangan adalah belum jelas karena hanya dengan memberikan SK (Surat Keputusan) tanpa adanya pengarahannya yang maksimal, tidak adanya informasi tentang program Pendidikan Inklusif, kapan

dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan.

c. Konsistensi

Program Pendidikan Inklusif selalu konsisten tidak berubah – ubah. SMA Negeri 1 Gedangan juga konsisten dalam melaksanakan program Pendidikan Inklusif. Mulai ditunjanya menjadi sekolah Inklusif sampai pada saat ini SMA Negeri 1 Gedangan tetap melaksanakan Program Pendidikan Inklusif tersebut.

2. Sumber daya

SMA Negeri 1 Gedangan, hanya memiliki 2 guru pendamping khusus dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa. SMA Negeri 1 Gedangan memiliki GPK dengan jumlah 2 guru pendamping khusus, sekolah merasa tidak mencukupi dengan 2 GPK untuk proses pendampingan siswa Inklusif. Minimalnya yang harus memiliki 5 GPK untuk mendampingi 14 Siswa Inklusif.

Kemudian SMA Negeri 1 Gedangan memiliki fasilitas dan sarana dalam menunjang Pendidikan Inklusif, seperti : ruang sumber, kursi roda, cermin peraga, kursi roda, dll tetapi perlu adanya penambahan lagi untuk fasilitas dan sarana agar dapat lebih maksimal dalam menunjang Pendidikan Inklusif. Sekolah juga pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berupa alat – alat masak.

Untuk dana dalam menunjang Pendidikan Inklusif, pendanaan untuk Pendidikan Inklusif masuk dalam anggaran sekolah yang berupa dana BOS. Tetapi tidak ada pendanaan khusus yang diberikan untuk Pendidikan inklusif. Jadi, selama 7 tahun terlaksananya Program Pendidikan Inklusif, SMA Negeri 1 Gedangan menerima sekali bantuan dana sebesar 10 juta dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan dana tersebut didapat dari bantuan orang tua siswa inklusif

3. Disposisi

Sikap atau watak guru terhadap siswa inklusif sudah baik, tidak ada lagi *bullying* atau merobeda – bedakan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler. Siswa – siswi reguler SMA Negeri 1 Gedangan juga sudah menerima dengan baik dengan adanya siswa Inklusif dilingkungan mereka.

4. Struktur organisasi

SMA Negeri 1 Gedangan tidak mengalami perubahan dengan adanya Program Pendidikan Inklusif, tetapi hanya ada penambahan dalam struktur organisasi tersebut, yaitu koordinator siswa inklusif yang tantiknya untuk membantu para siswa inklusif. SMA Negeri 1 Gedangan juga tidak mendapat perhatian atau perlakuan khusus dari pemerintah sebagai pelaksana Program Pendidikan Inklusif.

Meskipun kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sidoarjo, SMA Negeri 1 Gedangan ini sudah cukup berhasil dalam melaksanakan Program Pendidikan Inklusif di sekolahnya. Bahkan sekolah SMA Negeri 1 Gedangan berhasil bekerja sama dengan Universitas Perguruan Tinggi dan dapat membawah siswa – siswa Inklusif sampai kepada perkuliahan.

Pembahasan

Dalam Penelitian ini, dasar utama pembahasan adalah Teori Implementasi Kebijakan Publik Model Model George C. Edward III. Menurut Edward, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi - konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mempengaruhi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Dalam kajian implementasi kebijakan, Edward mulai dengan mengajukan keberhasilan, kedua, hambatan utama yang apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal. Menurut Edward, terdapat empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor - faktor atau variable tersebut adalah (Wirarno, 2004:125) :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. (Sutarsono, 2009:90). ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak - dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksud menyangkut transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi. Hal ini sudah sesuai dengan teori. Pembuatan kebijakan menyampaikan informasi dengan memberikan SK penunjukan sekolah inklusif, kemudian diadakan workshop dan pengarahannya. Kemudian untuk pelaksanaan kebijakan juga telah menyapaikan informasi tersebut kepada sasaran kebijakan dengan cara sosialisasi dan pencatatan web di PPDB, untuk konsistensi dalam program ini sudah cukup konsisten baik dari pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakannya. Tetapi untuk hal kejelasan, pembuatan kebijakan dirasa masih kurang jelas dalam memberikan kejelasan pada pelaksanaan kebijakan.

2. Sumberdaya

Perintah - perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber - sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan - kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber - sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber - sumber yang penting tersebut meliputi, Staff yang memadai serta keahlian - keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas - tugas mereka, Wewenang dan fasilitas - fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul - usul diatas

kemas guna melaksanakan pelayanan public, serta sumber daya keuangan yang digunakan untuk menunjang dalam pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya manusia atau staf dalam hal ini adalah GPK (Guru Pendamping Khusus) dimana guru tersebut adalah sebagai pendamping khusus untuk siswa inklusif. Sumber Daya Manusia atau GPK (Guru Pendamping Khusus) yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan belum memadai. Karena SMA 1 Gedangan hanya memiliki 2 orang GPK (Guru Pendamping Khusus) dimana yang harus mendampingi 14 siswa inklusif dengan kelas yang berbeda – beda. Kemudian untuk fasilitas SMA Negeri 1 Gedangan juga belum cukup memadai karena masih banyak fasilitas yang belum dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan dikarenakan kurangnya sumber daya ekonomi atau keuangan yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikutip oleh Winarno (2004: 130) bahwa jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.

3. Disposisi

Sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan sebagai pelaksana kebijakan, baik dari segi Guru dan siswa salah menerima dengan baik siswa inklusif yang berada dilingkungan sekolah mereka.

Hal ini sudah menunjukkan bahwa Disposisi atau watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, jika para pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, berarti adanya dukungan, kemangkutan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit.

4. Struktur birokrasi

SMA Negeri 1 gedangan memiliki struktur birokrasi sendiri untuk melayani peserta didik inklusif. Mereka hanya menambahkan koordinator siswa inklusif pada struktur yang sudah dimiliki, yang bertugas untuk menangani siswa – siswa inklusif dan juga menyiapkan apa yang akan dibutuhkananya. Sehingga masing – masing akan mempunyai SOP yang berbeda – beda. Hal ini sudah sesuai dengan teori bahwasannya Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting adalah adanya prosedur potensi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak (Winarno: 2004: 132).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Pendidikan Inkusif di SMA Negeri 1 Gedangan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

Jurnal Manajemen Jaya Negara
Vol. 9, No.2 Juli 2017

ISSN: 2548-9148

1. Pola komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk mentransmisikan tentang program Pendidikan Inklusif yaitu dengan memberikan (SK) penunjukan, pembekalan, dan workshop kepada sekolah SMA Negeri 1 Gedangan, kemudian untuk menyampaikan program tersebut kepada sasaran kebijakan SMA Negeri 1 Gedangan melakukan sosialisasi dan dicantumkan di *website* PPDB. Kejelasan dalam komunikasi belum maksimal, untuk konsistensinya sudah konsisten dalam pedoman program, maupun pelaksanaannya.
2. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumberdaya peralatan atau fasilitas penunjang pelaksanaan Pendidikan Inklusif, serta sumberdaya ekonomi belum maksimal untuk menunjang dalam Program Pendidikan Inklusif
3. Disposisi atau watak dan karakteristik yang dimiliki oleh guru – guru dan siswa – siswa SMA Negeri 1 Gedangan sudah maksimal dalam menerima siswa inklusif
4. Struktur birokrasi SMA Negeri 1 Gedangan tidak berubah hanya ada penambahan Koordinasi siswa inklusif.
5. Kebijakan Program Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan sudah berjalan dengan maksimal dalam Implementasinya

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, mengenai Implementasi Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan, maka saran yang dapat dijadikan pertimbangan adalah :

1. Perlu adanya pembekalan yang maksimal bagi guru – guru tentang program Pendidikan Inklusif agar mereka lebih banyak lagi mengetahui tentang Pendidikan Inklusif
2. Bahwa perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan manfaat dari Pendidikan Inklusif
3. Perlu adanya tambahan sumber daya manusia (Guru Pendamping Khusus) yang disediakan atau diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah yang melaksanakan Program Pendidikan Inklusif agar sekolah tersebut tidak kesusahan dalam mencari guru pendamping khusus (GPK).
4. Perlu adanya pertimbangan fasilitas, sarana dan prasarana, dan juga tambahan dana khusus untuk sekolah yang melaksanakan Pendidikan Inklusif agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Barnawi & Muhammad Munadi. 2013. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta : Ar - Ruzz media
- Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung . PT. Remaja Rosdakarya
- Jurnal Manajemen Jaya Negara ISSN: 2548-9348
Vol. 9, No.2 Juli 2017

Hery Kurnia Sulistyadi, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo" Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Miranti Ointu, Mohammad Irfan dan Nawawi Natsir, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016 halaman 72-83. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Palu". Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana, Universitas Tadulako.

Moleong, Lexy J . 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Redanti Purwadi, Jurnal Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 2, Januari 2013, halaman 123-132. "Implementasi Kebijakan Penempatan TKW Diluar Negeri" Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

Solichin Abdul Wahab, Haji. 2012. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model - model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : PT.Bumi Aksara

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Jakarta: Buku Kita

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Presindo

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasaan dan/atau Bakat Istimewah

Undang – Undang Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Internet

www.jawapos.com

www.kompas.com

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA NEGERI 1 GEDANGAN SIDOARJO

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

4%

2

docplayer.info

Internet Source

2%

3

disdik.depok.go.id

Internet Source

1%

4

id.scribd.com

Internet Source

1%

5

www.ejournal.upnjatim.ac.id

Internet Source

1%

6

eraisna85.blogspot.com

Internet Source

1%

7

Submitted to iGroup

Student Paper

1%

8

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

1%

9

Dini Purnawansyah, Yuni Lestari.

"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DPRD KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

<1%

10

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

<1%

11

www.alishlah.net

Internet Source

<1%

12

novitamarine.wordpress.com

Internet Source

<1%

13

Submitted to Universitas Islam Malang

Student Paper

<1%

14

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

<1%

15

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

<1%

16

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1%

17

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1%

18

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1%

19	www.pusaka-community.org Internet Source	<1%
20	onesearch.id Internet Source	<1%
21	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1%
22	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
23	journal2.um.ac.id Internet Source	<1%
24	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
25	ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1%
26	journal.unair.ac.id Internet Source	<1%
27	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1%
28	www.gunadarma.ac.id Internet Source	<1%
29	dokumen.tips Internet Source	<1%

30	www.neliti.com Internet Source	<1%
31	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1%
32	Yuli Astutik, Soebijantoro Soebijantoro. "Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Pelestarian Museum Trinil Tahun 2010-2013", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015 Publication	<1%
33	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
34	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
35	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
36	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
37	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1%
38	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
39	adoc.tips Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On